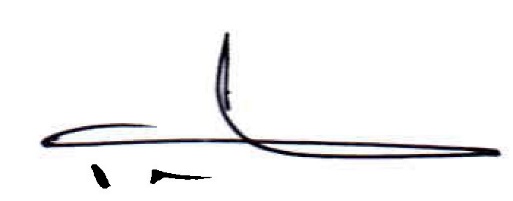
**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Rembang Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang Tahun 2020 merupakn bentuk komitmen nyata Kecamatan Rembang dalam mengimplementasikan e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

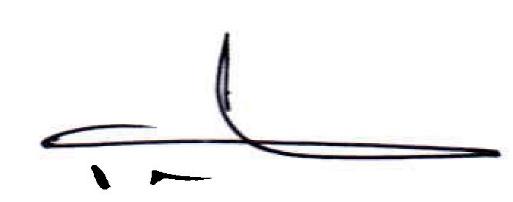
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada Masyarakat tentang Kinerja lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran tahun 2020. Proses kinerja Kantor Kecamatan Rembang telah diukur, di evaluasi, di analisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis ( Renstra ) dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dimasing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan, capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Govermance*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagaimana bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2021

CAMAT REMBANG



Drs. MUSTHOLIH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199503 1 001

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada tahun 2020 ini, Kecamatan Rembang telah melaksanakan 4 ( Empat ) Program, 11 ( sebelas ) kegiatan. Kegiatan tersebut direncanakan sebagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020.

Guna mewujudkan Visi Pemerintah kabupaten Rembang tahun 2016-2021 yaitu**“Tewujutnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”**

Untuk mengacu Visi tersebut diatas dengan tujuan dimaksud,maka Kecamatan Rembang memprioritaskan 4 Program yang dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Manajemen administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Kuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
4. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2020, Kecamatan Rembang telah melaksanakan 4 Program meliputi 11 kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.319.965.905, - ( Lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga sampai akhir tahun 2020 Kecamatan Rembang telah melaksanakan semua kegiatan dengan tingkat capaian 95,34 %.

Dari total anggaran tersebut yang sudah terealisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp.5.072.142.446,- ( Lima milyar tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan capaian 95,34 %.

Untuk pencapaian **Sasaran – 1** yaitu Meningkatnya Manajemen administrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, menunjukan bahwa Target Perekaman KTP 2.000 dan KK 8.000 di Kecamatan Rembang pada tahun 2020, ternyata meningkat terealisasi sebesar 1.713 KTP dan KK terealisasi 7.315 KK . rata-rata tercapai 95 %. Sementara itu pelayanan PPAT ditargetkan 100 Akta, realisainya 90 Akta Pelayanan Legalisasi SKTM, SKCK, NTCR dan surat yang lain ditargetkan 5.000 terealisasi 4.210 mencapai target 91,02 %. Pelayanan Ijin Usaha Target 100 Dokumen realisasi 30 dokumen mencapai taget 30 %. Untuk Pengadaan Printer, mebeler tercapai 98,09%, pengadaan instalasi listrik, telpon dan air tercapai 100%, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai 100%, Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional tercapai 99,82, Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana lingkungan kecamatan tercapai 100%, Pentaan Lingkungan Kecamatan 100%, Pembangunan Gudang Arsip Kecamatan tercapai 100%.

Sementara pada pencapaian **Sasaran -2** yaitu dalam Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mencapai 100 % hal ini dibuktikan dengan tertibnya laporan-laporan capaian kinerja seperti Penyusunan Renja,Renstra,lkjip dikirim tepat waktu

Untuk capaian **Sasaran -3** ,yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, mencapai 100 % hal ini dibuktikan dengan pengaplotan segala kegiatan yang ada di kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Untuk Capaian **Sasaran-4**, yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat terealisasi 94.48 %. Sehingga Pengadministrasi Desa dalam RKP, APBdes, SPJ ADD/ Dana Desa/ Pajak Retribusi, Evaluasi APBDes, Fasilidasi Data Aparat Desa, Verifikasi APBDes, berjalan lancar dan tertib, Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 dengan capaian 99,99 %,

**DA F T A R I S I**

**KATA PENGANTAR i**

**IKHTISAR EKSEKUTIF ii**

**DAFTAR ISI v**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 1
3. Maksud dan Tujuan 2
4. Gambaran Umum 2
5. Gambaran Umum Organisasi 4
6. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan pencapaian Kinerja 12

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**  13

1. Rencana Strategis 13
2. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2020 16

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** 19

1. Capaian Kinerja Organisasi 19
2. Perbandingan Antara Renstra Lama dan Renstra Baru 27
3. Realisasi Anggaran Tahun 2020 29

**BAB V PENUTUP**  31

1. Kesimpulan 31
2. Langkah – Langkah Strategi 32

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,memberikan kewenangan kepada daerah Povinsi/ Kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan per undang-undangan yang menjadi acuan bagi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat daerah dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kep Men.

Agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik,maka harus disusun dala suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan pemprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1. **Landasan Hukum**

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang tahun 2020, dilandasi dengan dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomo 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1. **Maksud dan Tujuan**

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Kecamatan Rembang adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana Yang telah ditetapkan.
2. Sebagaimana acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti Akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
4. **Gambaran Umum**
   * 1. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai yang terdapat di Kecamatan Rembang adalah 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dapat dikelompokkan sebagai berikut :

##### Menurut Jenis Kelamin

* 1. Laki-laki : 18 orang
  2. Perempuan : 6 orang

1. Menurut Usia
   1. 17 – 30 tahun : orang
   2. 31 – 50 tahun : 14 orang
   3. 51 tahun keatas : 10 orang
2. Menurut Pendidikan dan Diklat Teknis, Fungsional dan Penjenjangan
   1. Lulus SD : orang
   2. Lulus SLTP : orang
   3. Lulus SLTA : 8 orang
   4. Lulus Sarjana Muda : orang
   5. Lulus Sarjana : 11 orang
   6. Lulus Pasca Sarjana : 5 orang

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur maka upaya pembinaan sumberdaya manusia aparatur selalu dilakukan antara lain melalui pendidikan penjenjangan struktural, pelatihan teknis operasional KTP / KK dan pelatihan-pelatihan lain yang diperlukan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan struktural adalah :

1. DIKLAT PIM IV : 3 orang
2. DIKLAT PIM III : 1 orang
3. DIKLAT PIM II : - orang

Sedangkan yang telah mengikuti pendidikan dan latihan fungsional adalah: -

* 1. Menurut Golongan Kepangkatan
     + 1. Golongan I : orang
       2. Golongan II : 6 orang
       3. Golongan III : 15 orang
       4. Golongan IV : 3 orang

**2. Prasarana dan Sarana (Perlengkapan)**

1. **Gedung dan Fasilitasnya**

Terdapat empat bangunan pokok yaitu bangunan Rumah dinas camat, Kantor, Musholla, Pendopo kecamatan dan gedung Arsip serta ruang BKB dan PM. Ruang pendopo yang dapat dipergunakan untuk pertemuan / rapat / sejenisnya. Sedangkan untuk bangunan kantor terdiri dari ruangan Kepala, Tata Usaha, ruangan Ruang Pelayanan KTP/KK dan perijinan Lainnya satu ruang tamu, ruang komputer, kamar mandi / WC, Ruang PKK, dan Data.

1. **Peralatan dan Kendaraan Operasional**

Kondisi peralatan dan perlengkapan kecamatan Rembang sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan kecamatan meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Jumlah** |
| 1 | Portable generating set | 1 unit |
| 2 | Mobil | 2 buah |
| 3 | Sepeda Motor | 20 unit |
| 4 | Mesin ketik manual standart (14-16) | 1 buah |
| 5 | Kardek Besi/Metal 4 laci | 3 buah |
| 6 | Rak Kayu | 2 buah |
| 7 | Kardek Besi /Metal 9 laci | 1 buah |
| 8 | Kardek Kayu | 1 buah |
| 9 | Lemari Kayu | 19 buah |
| 10 | Papan Visuil Monografi | 2 buah |
| 11 | Papan Pengumuman | 1 buah |
| 12 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 26 set |
| 13 | Meja Rapat | 28 buah |
| 14 | Meja Tulis/Kerja | 9 buah |
| 15 | Meja Podium | 1 buah |
| 16 | Televisi | 2 buah |
| 17 | Kursi Rapat | 130 buah |
| 18 | Kursi Tamu | 2 set |
| 19 | Kursi Putar | 6 buah |
| 20 | Kursi Biasa | 31 buah |
| 21 | Bangku Tunggu | 2 buah |
| 22 | Meja Komputer | 6 buah |
| 23 | Meja Biro | 2 buah |
| 24 | Ac Split | 15 buah |
| 25 | Radio CB | 2 buah |
| 26 | Sound Sytem | 2 buah |
| 27 | PC Unit | 7 buah |
| 28 | Lat Top | 11 buah |
| 29 | Note Book | 1 buah |
| 30 | Printer | 13 buah |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 10 buah |
| 32 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 1 buah |
| 33 | Kursi kerja Pejabat Eselon III | 1 buah |
| 34 | Kursi kerja Pejabat lain-lain | 1 buah |
| 35 | Proyektor + Attachment | 2 buah |
| 36 | Camera Elektronic | 1 buah |
| 37 | Handy cam | 1 buah |
| 38 | Lemari Pendingin | 1 buah |
| 39 | Kipas Angin berdiri | 4 buah |
| 40 | Kipas Angin Tempel | 2 buah |

1. **Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan Rembang,terdiri dari :

1. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 ( dua) Pejabat Struktural yaitu :
2. Kepala Sub. Bag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Sub. Bag. Program dan Keuangan.
4. Kepala seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat.
8. Kelurahan Terdiri dari :

1). Sekretariat

2). Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

3). Seksi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. **Camat**
2. **Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

1. **Fungsi**
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintaha daerah yang ada di Kecamatan;
10. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. **Sekretaris Kecamatan**
12. **Tugas Pokok**

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

1. **Fungsi**
2. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
4. Pembinaandan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang–undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan Kecamatan;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

**Tugas Pokok:**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

## Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1. **Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

1. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian Urusan Otonomi Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Kesejahtraan Rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian Urusan Otonomi Daerah di bidang Kesejahtraan Rakyat.

1. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**Tugas Pokok :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal Kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

1. **Lurah**

**Tugas Pokok :**

Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pealaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Sekretariat kelurahan**

**Tugas Pokok** :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan Penatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan.

1. **Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum**

**Tugas Pokok:**

Melakukan penyiapan dan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi seta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemilu, kelembagaan masyarakat, pertanahan dan perijinan IMB, HO, kawasan perumahan, keramaian, SKCK, ijin tebang dan pengangkutan kayu.

1. **Seksi Ekonomi,pembangunan dan kesejahteraan Rakyat**

**Tugas Pokok:**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, perijinan nikah, talak, cerai, rujuk dan pembinaan kehidupan keagamaan.

1. **Kelompok Jabatan Fungsional**

**Tugas Pokok:**

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagan Susunan Organisasi Kecamatan**

# 

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Tata Pemerintahan

**CAMAT**

Subbagian Program dan Keuangan

**SEKRETARIAT**

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Lurah

SEKRETARIAT

1. **Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan,diantaranya :

1. Pembuatan KTP/ KK dan KK On Line belum optimal karena terpengaruh jaringan Komunikasi dan Internet sering lemot, akhirnya kelamaan menunggu ( marah-marah ).
2. Warga belum sepenuhnya memenui syarat syarat pengajuan permohonan Kependudukan sesuai aturan dan petuntuk dari Tingkat Kabupaten.
3. Warga mengeluh dan kesulitan bahwa Pencetakan KTP /KK di Dindukcapil Rembang termasuk pengurusan kependudukan tentang pindah penduduk/tempat, mohon Pencetakan dan pengurusan tentang kependudukan untuk dialihkan ke tingkat Kecamatan.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Kecamatan Rembang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **Rencana Strategi**

Rencana Strategi adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,peluang,tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Kecamatan Rembang tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pengbangunan selama 5 tahun. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Rembang sbb :

1. **Visi**

Visi merupakan suatu keadaan dan harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang.Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangt Kebersaaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan**.”

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang maka Kantor Kecamatan Rembang memiliki Visi sebagai berikut **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima Berbasis Kinerja”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kecamatan Rembang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Rembang yang Prima kepada seluruh masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dan menfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan Urusan Pemerintahan ,Pembangunan dan kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

1. **Misi**

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi /Instansi Pemerintah agar cita-cita yang diharapkan dalam visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya Visi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui alasan keberadaanya.

1. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan Pemerintahan melalui Bimtek/Diklat Teknis.
3. Meningkatkan Sarana dan prasarana pelayanan.
4. Meningktkan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa.
5. **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 ( lima) tahun .Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis:

Tujuan yang dicapai:

Meningkatkan Kualitas pelayana Publik Kecamatan Rembang.

Meningkatkan Kinerja dan Kapasitas Pemerintahan Desa

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,terarah dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi OPD Kecamatan Rembang tahun 2016-2021 terdapat tujuan serta 3 sasaran strategis.

Sasaran yang dicapai:

1. Meningkatnya Sarpras dan Pelayanan.
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa.
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.

**5. Indikator Kinerja Utama.**

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan Tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dimasing-masing satuan perangkat kerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama tahun 2020 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** |
| 1 | Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | * + - 1. Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja PD | 90% |
| 2 | Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 1. Persentase ketercapaian pelayanan umum 2. Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur 3. Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian 4. Persentase ketercapaian pelayanan keuangan | 90%  90%  90%  90% |
| 3 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 1. Persentase Informasi yang disampaikan ke publik | 90% |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Persentase pemerintahan Desa/kelurahan yang tertib administrasi  Persentase pemerintahan Desa/kelurahan yang lunas bayar PBB | 100%  100% |
| 5 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Persentase pemerintahan Desa/kelurahan yang tertib administrasi 2. Persentase penetapan APBDesa tepat waktu | 100%  100% |
| 6 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 1. Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat Desa/ kelurahan yang aktif | 100% |
| 7 | Meningkatkan Pembinaan Ketentraman dam ketertiban masyarakat | 1. Persentase penyelesaian permasalahan K-3 ( Ketertiban, ketentraman dan keindahan) | 100% |

1. **Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2020**

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata Rencana Kegiatan Tahunan ( RKT ) tahun 2020, mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagai telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ( PK ) yang telah disepakati antara Camat dengan Kepala Daerah tahun 2020 yang telah terdiri dari 4 Program dan 11 kegiatan dengan indikator dan target kinerja, sebagai berikut:

| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Program/**  **kegiatan** | **Anggaran**  **( Rp ).** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 1. Persentase Ketercapaian Pelayanan umum 2. Prosentase Ketercakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Prosentase peningkatan sumberdaya aparatur 4. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik | 100%  100%  100%  100% | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **1.192.419.760** |
|  | 1. % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran / umum yang diterapkan dengan baik | 100% | 1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | 182.163.011 |
|  | 1. Jumlah Dokumen pengelolaan BMD yg dikelola baik | 3 dok | 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 854.356.749 |
|  | 1. Jumlah dokumen manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik | 8 dok | 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | 10.000.000 |
|  | 1. Jumlah Dokumen/ laporan keuangan dengan kualitas baik | 3 Dok | 1. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan | 145.900.000 |
| Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja PD | 90% | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **17.890.000** |
|  | 1. Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 3 Dok | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 |
|  | 1. Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun | 2 Dok | 1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 7.890.000 |
| Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 1. % Informasi yang disampaikan ke publik | 90% | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | **2.400.000** |
|  | 1. Jumlah informasi yang disampaikan ke publik | 3 Informasi | Pengelolaan keterbukaan informasi publik | 2.400.000 |
| Meningkatanya Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat | 1. Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan 2. Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat 4. Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 6  6  6  6 | **Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat** | **4.107.256.145** |
|  | 1. Persentase pemerintahan Desa/kelurahan yang tertib administrasi 2. Persentase pemerintahan Desa/kelurahan yang lunas bayar PBB | 100% | Fasilitasi Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa/Kelurahan | 3.688.832.145 |
|  | 1. Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola 2. Persentase penetapan APBDesa tepat waktu | 100% | Fasilitasi Pemeberdayaan Masyarakat Desa | 205.000.000 |
|  | 1. Persentase penyelesaian peramasalahan K-3 (Ketertiban,ketentraman dan keindahan) | 100% | Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | 77.800.000 |
|  | 1. Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat Desa/kelurahan yang aktif | 100% | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 153.529.000 |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Rembang.Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistimatis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan Interpelasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

-90 -100 : Amat Baik

-80 - 89 : B a i k

-50 - 79 : Cukup Baik

< 49 : Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut,adalah sebagai berikut.

1. **Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS )**

Hingga akhir Tahun 2020, Kecamatan Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Kecamatan Rembang sebagai tempat pelayanan Publik yang optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai,maka sejauhmana pencapaian tujuan tersebut,telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran keilma sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strtegis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | %  Capaian 2020 | % Capaian 2019 | % Capaian 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 1. Jml Perekaman KTP 2. Waktu Perekaman KTP 3. Jml Pelayanan KK 4. Waktu Pembuatan KK 5. Jml Pelayanan PPAT 6. Waktu Pembuatan Akta 7. Jml Pelayanan Legalisasi 8. Waktu Pelayanan Legalisasi | 2.000 KTP  10 Menit  8.000 KK  10 menit  100  3 bl  5.000  5 menit | 1.713 KTP  10 menit  7.315 KK  10 menit  90  3 bl  4.210  5 menit | 85.65%  91.43%  90.00%  84.20% | 59.60 %  63.50%  81.00 %  91.02% | 100 %  100%  100 %  100% |
| **Rata-rata capaian sasaran 1** | | | | **91,00%** | **73.00%** | **100%** |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, dari 8 Indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa ada indikator yang capaian kinerja yang melebihi target hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran warga untuk memiliki Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pertanahan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa,jumlah perekaman KTP di Kecamatan Rembang mencapai 1.713 atau 85,65 % dari target yang telah ditetapkan, Perekaman KTP sudah sesuai dari capaian yang ditargetkan karena disebabkan oleh adanya perubahan pelayanan dengan sistim On Line, yaitu pencetakan KTP harus di Dindukcapil Kabupaten Rembang. Berkurangnya pembuatan KTP bertambahnya perekaman dengan cara mengentri data dan cek iris mata. Pembuatan Dokumen KK, pencetakan KK di kecamatan untuk tanda tangan KK di Dindukcapil Rembang. Adapun pelayanan KK mencapai 7.315 KK mencapai 91,43 % dari 8.000 ditargetkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran-1, diantaranya adalah :

1. Dengan Pelayanan KTP secara On Line maka pelayanan terpengaruh dengan jaringan komunikasi dan Internet sering lemot, akhirnya warga kelamaan menunggu.
2. Warga belum sepenuhnya memenuhi syarat syarat pengajuan permohonan kependudukan sesuai aturan.
3. Warga mengeluh dan kesulitan bahwa untuk Pencetakan KTP yang mencetak Dindukcapil Rembang,dan termasuk pengurusan kependudukan tentang Rekomendasi Pindah penduduk/tempat.
4. Warga Mohon agar pencetakan baik KTP/KK/Pindah tempat, bisa diurus di Kecamatan setempat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja,upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepda mastayakat untuk pentingnya memiliki dokumen-dokumen Penting KK/KTP/ Akta Tanah dan Perijinan Usaha.
2. Penyederhanaan Sistim pelayanan sehingga mudah,cepat dan memuaskan.

Oleh karena itu,ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Memperbanyak kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan dengan Ramah,Cepat dan memuaskan.

Adapun target Renstra 2016 -2021 sampai dengan 2020, pada sasaran -1 mencapai 98,30 %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Efisiensi | = | 100% - | ( 1.172.147.640 ) | x 100% |
| 1.192.419.760 |
|  | = | 1% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * Efektifitas | = | (101 x 100%) | |  |
|  |  | 100 | |  |
|  | = | 101% | |  |

1. **Sasaran 2**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja,target dan realisasinya tercemin pada tabel sebagai berikut

| Sasaran Strtegis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | % capaian Tahun 2020 | % capaian Tahun 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja PD | 90% | Dok | 98,60% | 98.60% | 100% |
| Rata-rata capaian sasaran 2 | | | | 98,60% | 98.60% | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator kinerja sasaran -2 tergambar bahwa bahwa ada indikator yang capaian kinerja kurang dari target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas tersebut bahwa, usaha untuk Meningkatkan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 100 % tercapai 98, 60%.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Menganggarkan untuk biaya Pemeliharaan.

Penggunaan Sasaran secara Efisien dan Efektif

Oleh karena itu kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Alokasi Anggaran Pemeliharaan.
2. Menginventarisir memelihara Barang Pemerintah.

Adapun realisasi capaian target Rencana Renstra SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2020,pada sasaran -2 telah mencapai 98,60%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Efisiensi | = | 100% - | ( 17.639.600 ) | x 100% |
| 17.890.000 |
|  | = | 1% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * Efektifitas | = | (101 x 100%) | |  |
|  |  | 100 | |  |
|  | = | 101% | |  |

1. **Sasaran 3**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | %  Capaian  Tahun 2020 | %  Capaian  Tahun 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 1. % Informasi yang disampaikan ke publik | 90% | 77.08% | 77.08 % | 100% | 100 % |
| **Rata-rata capaian sasaran 3** | | | | **77.08%** | **100%** | **100 %** |

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran -3, tergambar bahwa ada indicator yang capaian kinerja yang kurang dari target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat,usaha untuk meningkatkan informasi yang di sampaikan ke publik target 90 % tercapai 77.08%.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja,upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaplotan kegiatan yang ada di kecamatan sesuai petunjuk dan tepat waktu.
2. Pembuatan laporan .

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh Strategi sebagai berikut :

1. Pengiriman Diklat/ Bintek /pelatihan Pegawai terkait dengan Informaasi Publik.
2. Mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang informaasi publik.

Adapun realisasi capaian target Renstra SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2020,pada sasaran-3 telah mencapai 99,95 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Efisiensi | = | 100% - | ( 1.850.000 ) | x 100% |
| 2.400.000 |
|  | = | 2% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * Efektifitas | = | (129 x 100%) | |  |
|  |  | 100 | |  |
|  | = | 129% | |  |

1. **Sasaran 4**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 4**, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | %  Capaian  Tahun 2020 | %  Capaian  Tahun 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Meningkatanya Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat | 1. Jumlah Desa yang menyusun Profil desa 2. Jumlah Desa yang menyusun LKPJ 3. Jumlah Desa /kelyang tetib menyusun SPJ 4. Jumlah Desa yang menyusun APBDesa 5. Prosentase Pelunasan PBB 6. Rapat Koordinasi Lintas sektoral 7. Jumlah Desa/kel yang melaksanakan Musrenbang Desa/Kel 8. Jumlah Desa yang Peserta Musrenbangcam 9. Prosentase Lembaga Desa /Kel yang aktif | 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  12 Kali  100 %  34 Ds/kel  100 % | 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  12 kali  100 %  34 Ds/kel  100 % | 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% | 100 %  100 %  100 %  100 %  99,75 %  100 %  100 %  100 %  - | -  -  100 %  100 %  100 %  -  100 %  100 %  - |
| **Rata-rata capaian sasaran 3** | | | | 100% | 99,48 % | 55 % |

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -2, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 9 indikator kinerja , sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan Kemandirian Desa, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa;
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral setiap Bulan.

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2016-2021 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran -2 telah mencapai 100 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran sesuai target yang telah ditetapkan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Efisiensi | = | 100% - | ( 3.880.505.206) | x 100% |
| 4.107.256.145 |
|  | = | 5% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * Efektifitas | = | (103 x 100%) | |  |
|  |  | 100 | |  |
|  | = | 103% | |  |

1. **Evaluasi dan Analisis Kinerja.**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran ( PPS ) yang telah dilakukan diatas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kecamatan Rembang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahunanggaran 2020 dikategorikan **Amat Baik.**

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 01**

**Target Dan Realisasi ( Per Sasaran Yang Ditetapkan ) Pada Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strtegis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | %  Capaian 2020 | % Capaian 2019 | % Capaian 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 1. Jml Perekaman KTP 2. Waktu Perekaman KTP 3. Jml Pelayanan KK 4. Waktu Pembuatan KK 5. Jml Pelayanan PPAT 6. Waktu Pembuatan Akta 7. Jml Pelayanan Legalisasi 8. Waktu Pelayanan Legalisasi | 2.000 KTP  10 Menit  8.000 KK  10 menit  100  3 bl  5.000  5 menit | 1.713 KTP  10 menit  7.315 KK  10 menit  90  3 bl  4.210  5 menit | 85.65%  91.43%  90.00%  84.20% | 59.60%  63.50%  -  81.00%  91.02% | 100 %  100%  -  100 %  100% |
| **Rata-rata capaian sasaran 1** | | | | **91,00%** | **73.00%** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strtegis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | % Capaian Tahun 2020 | % Capaian  Tahun  2019 | %Capaian Tahun 2018 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. % keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja PD | 90% | Dokumen | 98,60% | 98.60% | 100% |
| **Rata-rata capaian sasaran 2** | | | | **98,89 %** | **97%** | **96,39 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strtegis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | % Capaian Tahun 2020 | % Capaian  Tahun  2019 | % capaian Tahun 2018 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** |
| Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 1. % Informasi yang disampaikan ke publik | 1 Dok | 1 Dok | 99,95 % | 100% | 100 % |
| **Rata-rata capaian sasaran 3** | | | | **99,95%** | **100%** | **100 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strtegis | Indikator sasaran | Target | Realisasi | %Capaian Tahun 2020 | %Capaian  Tahun  2019 | % Capaian Tahun 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |
| Meningkatanya Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat | 1. Jumlah Desa yang menyusun Profil desa 2. Jumlah Desa yang menyusun LKPJ 3. Jumlah Desa /kelyang tetib menyusun SPJ 4. Jumlah Desa yang menyusun APBDesa 5. Prosentase Pelunasan PBB 6. Rapat Koordinasi Lintas sektoral 7. Jumlah Desa/kel yang melaksanakan Musrenbang Desa/Kel 8. Jumlah Desa yang Peserta Musrenbangcam 9. Prosentase Lembaga Desa /Kel yang aktif | 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  12 Kali  100 %  34 Ds/kel  100 % | 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  12 kali  100 %  34 Ds/kel  100 % | 100%  100%  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % | 100 %  100 %  100 %  100 %  99,75 %  100 %  100 %  100 %  - | -  -  100 %  100 %  100 %  -  100 %  100 %  - |
| **Rata-rata capaian sasaran 4** | | | | **100%** | **99 %** | **100 %** |

Dari tabel diatas dilihat rata-rata capaian kinerja dari sasaran 1 s/d 4 tercapai 95,89% dari target yang telah ditetapkan.

1. **Perbandingan antara Renstra Lama dan Renstra Baru**

| **RENSTRA LAMA** | | **RENSTRA BARU** | |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | Kegiatan | Program | Kegiatan |
| * 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan jasa Surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 11. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/kebersihan 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | * 1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 1. Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan 4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur |
| * 1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Pengadaan Instalansi Listrik, Telepon Dan Air 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Ligkungan Kantor 7. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kantor 8. Rehabilitasi Pendopo Kecamatan | * 1. Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| * 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 1. Penyusunan Renstra, Renja | * 1. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik | Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik |
| * 1. Program Penunjang Pemerintah Kecamatan | 1. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu) 2. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Penyenggaraan Musrenbang Kecamatan 4. Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qu’ran/Seleksi Tilawatil Quran dan Festival anak sholeh Indonesia 5. Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 6. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo 7. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah 8. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari 9. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar 10. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunungkulon 11. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Magersari 12. Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh 13. Promosi PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) 14. Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan 15. Fasilitasi Pokjanal Kecamatan Sehat 16. Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 17. Pemberdayaan Forum Kelembagaan Perempuan Dan Anak Tingat Kecamatan 18. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Tingkat Kecamatan 19. Penunjang Pemilihan Kepala Desa 20. Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi 21. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan 22. Penguatan Pokjanal Posyandu 23. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 24. Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini | * 1. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Dan Ketentraman Masyarakat | 1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pembinaan Ketrentraman Dan Ketertiban Masyatrakat 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan |

1. **Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang Tahun Anggaran 2020, yaitu : pada tahun 2020 kecamatan Rembang mendapatkan Anggaran sebesar Rp.5.319.965.905.- ( Lima milyar tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus lima rupiah ), namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.5.072.142.446.-( Lima milyar tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau terserap 95,34%.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

| **No** | **Progam/Kegiatan** | **Anggaran** | **Realisasi** | **Selisih** | **Persen (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Program manajemen Aministrasi Umum,Kepegawaian dan Pelayanan keuangan pearangkat Daerah** | **1.192.419.760,-** | **1.172.147.640** | **20.272.120** | **98,30** |
|  | 1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum | 182.163.011 | 170.607.405 | 11.555.606- | 93,66 |
|  | 1. Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur | 854.356.749- | 845.873.335 | 8.483.414 | 99,01 |
|  | 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur | 10.000.000,- | 9.914.950,- | 85.050 | 99,90 |
|  | 1. Peningkatan dan pengembangan system pealaporan keuangan | 145.900.000,- | 145.751.950,- | 148.050 | 99,90 |
| **B** | **Program Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah** | **17.890.000,-** | **17.639.600,-** | **250.400** | **98.60** |
|  | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000,- | 9.999.900,- | 100 | 100 |
|  | 1. Penyusunsn Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.890.000,- | 17.639.700,- | 250.300 | 96.83 |
| **C** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | **2.400.000,-** | **1.850.000,-** | **550.000** | **77,08** |
|  | 1. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik | 2.400.000,- | 1.800.000,- | 550.000 | 77.08 |
| **D** | **Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Masyarakat** | **4.107.256.145,-** | **3.880505.206** | **226.750.939** | **94.48** |
|  | 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | 3.688.832.145,- | 3.481.291.556 | 207.540.589 | 94.37 |
|  | 1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 187.095.000,- | 177.799.600,- | 9.295.400 | 95.03 |
|  | 1. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | 153.529.000,- | 145.791.550,- | 7.737.450 | 994.96 |
|  | 1. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat | 35.000.000,- | 29.466.900,- | 5.533.100 | 84,19 |
| **JUMLAH** | | **5.319.965.905,-** | **5.072.142.446,-** | **247.823.459** | **95,34** |

**BAB IV**

**P E N U T U P**

1. **Kesimpulam**

Kecamatan Rembang sebagai Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan Umum,pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan,evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati,pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan,pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat.Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber daya manusia,sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas,maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Rembang melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil,karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **(Amat** **Baik / Baik / Cukup baik /kurang** ) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) dicapai 95,34 % dengan rincian sbb:

Sasaran 1 : 98.30 %

Sasaran 2 : 98,60 %

Sasaran 3 : 77.08%

Sasaran 4 : 94.48 %

Pagu Kecamatan Rembang Anggaran sebesar Rp.5.319.965.905, - (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah), namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 5.072.142.446.- (Lima Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) atau terserap 95,34%.

1. **Langkah-langkah Strategis**

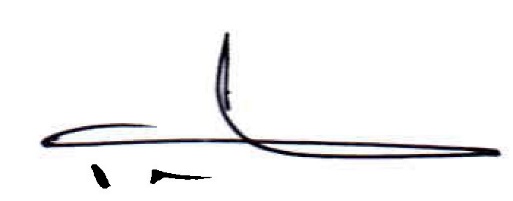
Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai suatu target tersebut adalah :

1. Perbaikan Jaringan On Line.
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada ( Pengabdian) untuk melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat.
3. Mensosialisasikan Pelayanan PATEN secara langsung,melalui Rapat Koordinasi atau Rapat Dinas lainnya.
4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berkala.

Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) diharapkan dapat digunakan sebagai masukan didalam melaksanakan Program/kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya,agar potensi/kendala dapat diantisipasi serta potensi peluang dapat diciptakan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 untuk Perangkat Daerah Kecamatan Rembang,semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan /kinerja yang akan datang.

Rembang, Januari 2021

C A M A T REMBANG

Drs. MUSTHOLIH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650312 199503 1 001